

2024



PEMERINTAH  
KABUPATEN KUDUS



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

**KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024**

Jl. Kudus – Colo No. 292 A Piji Kode Pos 59353 Telp. (029) 433194

Email : [kecamatanawe13@gmail.com](mailto:kecamatanawe13@gmail.com) Website : [dawe.kuduskab.go.id](http://dawe.kuduskab.go.id)

# DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	
KATA PENGANTAR .....	

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang.....	
1.2	Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi .....	
1.3	Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama .....	
1.4	Landasan Hukum .....	
1.5	Sistematika.....	

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

2.1	Rencana Strategis .....	
2.2	Rencana Kinerja .....	
2.3	Perjanjian Kinerja.....	

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1	Capaian Kinerja Organisasi.....	
3.2	Analisis Capaian Kinerja .....	
3.3	Realisasi Anggaran .....	

## **BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	
4.2	Rekomendasi .....	

## **LAMPIRAN**

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Lain-lain yang dianggap perlu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Kecamatan Dawe mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/91/2022 tentang Perubahan atas lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/ 158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Dawe melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Kudus, Februari 2024



NIP. 19870409 200602 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 serta Peraturan Bupati Kudus nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kudus maka berdasarkan hal tersebut di atas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dibentuk.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja juga merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tahun 2023 yang merupakan tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023.

### **1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus , terakhir kali dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

## **Tugas Pokok**

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Fungsi**

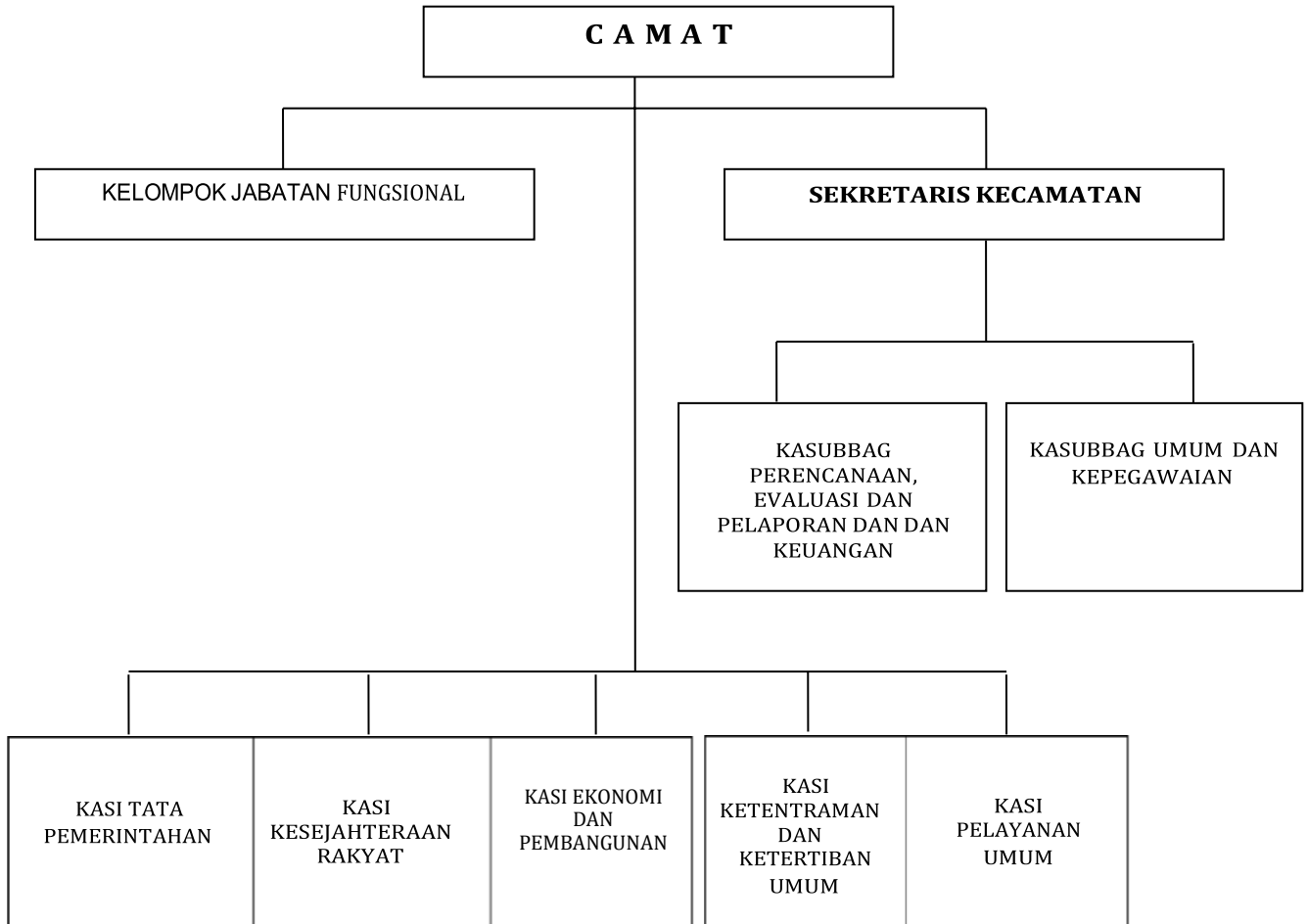
- a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, pelayanan Umum;
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum serta;
- c. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur Organisasi Kecamatan Dawe terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan membawahi :
  - 2.1 Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
  - 2.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DAWE



Gambar 1.1

### 1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI & PERMASALAHAN UTAMA

Isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas dalam prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan Kecamatan Dawe kabupaten Kudus senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Dawe dimasa yang akan datang. Suatu keadaan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mengetahui sejauh mana Penyelesaian Isu Strategis di Kecamatan Dawe dapat dilihat dari capaian Kinerja IKU Indeks Pemerintahan Kecamatan dan IKU Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Isu strategis bagi Kecamatan Dawe diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Dawe selama lima tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Dawe, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan.	Kurang optimalnya pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal dan OPD terkait.</li> <li>• Kurang efektifnya koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat.</li> <li>• Kurang optimalnya penyediaan data ketentraman dan ketertiban</li> <li>• Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentraman dan ketertiban</li> </ul>
		Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang efektifnya sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat, pemerintah dan swasta</li> <li>• Belum efektifnya kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat di kecamatan.</li> </ul>
		Belum optimalnya tugas bidang Kesejahteraan rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penyediaan data base bidang kesejahteraan rakyat</li> <li>• Kurang optimalnya koordinasi dengan Pemdes terkait prasarana sarana pelayanan umum</li> </ul>
		Belum optimalnya Pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya inovasi pelayanan umum</li> <li>• Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait pelayanan di Kecamatan</li> </ul>

		Belum optimalnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintah Desa belum tepat waktu (RKPDDes, APBDes, LKPJ, LPPD, RPJMDes).</li> <li>• Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemdes.</li> </ul>
2.	Kurangnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, RTP, GAB dan GBS, SAKIP, LPPD, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan)</li> <li>• Kurangnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>• Kurangnya Sarpras perkantoran</li> </ul>

Mendasarkan pada hal di atas, maka isu strategis di kecamatan Dawe adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
2. Kurangnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP**

LKjIP ini disusun terdiri dari 4 bab dengan rincian sebagai berikut :

##### **Bab. I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.



## BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

## BAB. III. Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi Kinerja tahun ini dengan dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB. IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## Lampiran

- 1). Perjanjian Kinerja tahun 2023
- 2). Lain-lain yang dianggap Perlu

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**2.1.1 Tujuan Perangkat Daerah**

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, maka Tujuan yang akan dicapai Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam 5 tahun (2018 s.d 2023) adalah "Mewujudkan fasilitasi Pelayanan Publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif".

**2.1.2 Sasaran Perangkat Daerah**

Untuk mencapai Tujuan PD maka diperlukan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yaitu :

1. Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

TABEL 2.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	1.1. Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Indeks Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	-	100
		1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	70	70	70	70	70

### 2.1.3 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Kecamatan Dawe memiliki 1 Tujuan, 2 Sasaran dan 2 Indikator Kinerja Utama.

TABEL 2.2

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Mewujudkan fasilitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Terwujudnya fasilitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Indeks Pemerintahan Kecamatan	%	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	Nilai	70

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari Pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Dawe pada tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kudus, untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana terlampir :

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Indeks Pemerintahan kecamatan	%	100	Camat
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIPperangkat daerah	Nilai	70	Camat
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	indeks	86	Sekcam
4	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Data / Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan Ketentuan	dok	8	Sekcam
5	Tersedianya dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Data/ Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan sesuai dengan ketentuan	%	90	Sekcam
6	Tersedianya administrasi umum PD	Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	%	90	Sekcam
7	Tersusunnya dokumen perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	8	Kasubbag PEP
8	Tersedianya laporan evaluasi kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	6	Kasubbag PEP
9	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang ang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	29	Kasubbag PEP
10	Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dok	4	Kasubbag PEP
11	Tersedianya komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disaediakan	jenis	5	Kasubbag Umpeg
12	Tersedianya barang habis pakai penunjang administrasi kantor	Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor	jenis	32	Kasubbag Umpeg
13	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	jenis	6	Kasubbag Umpeg

14	Tersedianya Belanja Alat Rumah Tangga	Belanja Alat Rumah Tangga	jenis	22	Kasubbag Umpeg
15	Tersedianya Belanja Karangan Bunga	Belanja Karangan Bunga	jenis	1	Kasubbag Umpeg
16	Tersedianya Belanja Pengisian Tabung Gas	Belanja Pengisian Tabung Gas	jenis	1	Kasubbag Umpeg
17	Tersedianya bahan logistikkantor	Jumlah Paket bahan logistikkantor yang disediakan	jenis	5	Kasubbag Umpeg
18	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	3	Kasubbag Umpeg
19	Tersedianya Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	jenis	3	Kasubbag Umpeg
20	Tersusunnya Laporan Penyelenggara n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	hari	200	Kasubbag Umpeg
21	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	12	Kasubbag Umpeg
22	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jenis	1	Kasubbag Umpeg
23	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daa Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daa Air dan Listrik yang di sediakan	jenis	3	Kasubbag Umpeg
24	Terbayarkan Honorarium Non PNS (PHD)	Honorarium Non PNS (PHD)	orang	1	Kasubbag Umpeg
25	Terbayarnya honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Pelayanan Umum ( Tenaga Kontrak )	Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Pelayanan Umum (Tenaga Kontrak )	orang	7	Kasubbag Umpeg
26	Tersedianya honor Tenaga Pelaksana Kegiatan Tenaga Administrasi	Honor Tenaga Pelaksana Kegiatan Tenaga Administrasi	orang	2	Kasubbag Umpeg
27	Terbayarnya Honorarium	Jumlah Honorarium Panitia Pelaksana	orang	8	Kasubbag Umpeg

	Panitia Pelaksana Kegiatan	Kegiatan			
28	Terbayarnya Premi Asuransi	Jumlah Premi Asuransi yang terbayar	dok	4	Kasubbag Umpeg
29	Tersedianya BBM dan Olie	Jumlah BBM dan Olie	liter	6000	Kasubbag Umpeg
30	Tersedianya Belanja Suku Cadang	Jumlah Belanja Suku Cadang	unit	16	Kasubbag Umpeg
31	Penyediaan Jasa Operasional Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Jasa Operasional Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas	unit	16	Kasubbag Umpeg
32	Tersedianya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas Operasional	unit	16	Kasubbag Umpeg
33	Tersedianya Gedung Kantor dan bangunan lainnya dipelihara/ rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya dipelihara/ rehabilitasi	unit	1	Kasubbag Umpeg
34	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dioerihara/ rahabilitasi	unit	4	Kasubbag Umpeg
35	Terpantaunya posko dan piket bencana alam	Jumlah posko terpantau dan piket bencana alam	posko	1	Kasi Trantib
36	Terbayarnya Honorarium linmas	Honorarium linmas	bulan	12	Kasi Trantib
37	Terbayarnya Honorarium piket kantor	Honorarium piket kantor	bulan	12	Kasi Trantib
38	Tersedianya Honor tim terpadu penanganan konflik sosial	Honor tim terpadu penanganan konflik sosial	bulan	12	Kasi Trantib
39	Tertanganinya kasus konflik sosial	Jumlah kasus konflik sosial yang tertangani	kasus	12	Kasi Trantib
40	Terlaksananya Rakor linmas	Jumlah rakor linmas	kali	12	Kasi Trantib
41	Terlaksananya Rakor tim terpadu penanganan konflik sosial	Rakor tim terpadu penanganan konflik sosial	kali	12	Kasi Trantib
42	Tersedianya pameran pembangunan yang dilaksanakan	Jumlah pameran pembangunan yang dilaksanakan	kali	1	Kasi ekbang

43	Terlaksananya lomba Desa	Jumlah desa yang mengikuti lomba	desa	1	Kasi ekbang
44	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang melaksanakan pembinaan	organisasi	1	Kasi ekbang
45	Terlaksananya pembinaan organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang melaksanakan pembinaan	organisasi	1	Kasi ekbang
46	Terlaksananya kegiatan sosial	Jumlah pelaksanaan fasilitas kegiatan sosial	kali	1	Kasi ekbang
47	Terlaksananya monev dan pelaporan dana desa	Jumlah pelaksanaan monev dan pelaporan dana desa	desa	8	Kasi ekbang
48	Terlaksananya festival seni dan budaya	Jumlah festival seni dan budaya yang terlaksana	kali	1	Kasi kesra

Program dan anggaran untuk mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	86 Nilai IKM	4.479.993.817
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	9.900.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	519.231.583
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan kegiatan koordinasi trantib umum	100 %	11.075.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	64.533.501
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	605.138.712
7	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	100 %	5.779.940
8	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	17.695.800



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi. Pengukuran yang dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta PP Menteri PAN dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang dipergunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

<b>KATEGORI</b>	<b>SKALA PENILAIAN</b>
Sangat Baik	$\geq 91\%$
Baik	76 - 90,99%
Cukup	66 - 75,99%
Kurang	51 - 65,99%
Sangat Kurang	$\leq 50,99\%$

Capaian kinerja organisasi Kecamatan Dawe dapat diukur melalui dua sasaran dan dua Indikator Kinerja Utama. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Indeks Pemerintahan Kecamatan	100%	56,44%	56,44%	Kurang	Seksi di Kec. Dawe
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	70	53,45	76,35%	Baik	Self Assesment LKE Kec. Dawe

Sasaran Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif mempunyai Indikator Kinerja Utama Indeks Pemerintahan Kecamatan dengan target capaian 100% dapat terealisasi 56,44% sehingga dengan kategori capaian Kurang.

Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah mempunyai Indikator Kinerja Utama Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah target Capaian 70 dapat terealisasi 53,45% sehingga capaian kinerja 76,35% dengan kategori capaian Baik.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 2 tahun);

Tujuan/Sasaran Kinerja: Mewujudkan fasilitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Kinerja 2023	Persentase Capaian Kinerja 2023	Persentase Capaian Kinerja terhadap Target Akhir Renstra	Benchmarking Prov/Pusat (jika ada)
	2020	2021	2022	2023				
Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	-	37,75	54,20	53,45	70	76,35%	-	-
Indeks Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	56,44%	100	56,44%	56,44%	-

Sasaran Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif mempunyai Indikator Kinerja Utama Indeks Pemerintahan Kecamatan dengan target capaian dari tahun ke tahun sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Indeks Pemerintahan Kecamatan, berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/91/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, maka untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 masih menggunakan Indikator Kinerja Utama sebelumnya yaitu persentase desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan.
- b. Tahun 2023 Target Kinerja 100% Realisasi Kinerja 56,44% Capaian Kinerja 56,44%, Sumber data berasal dari Seksi pada Kecamatan Dawe Tahun 2023 dengan kategori Kurang. Hal ini disebabkan oleh :
  - Penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintah Desa pada 18 desa belum sepenuhnya tepat waktu (RKPDDes, APBDDes, LKPJ, LPPD).
  - Dari 18 desa hanya 5 Desa yang sudah ditetapkan sebagai Desa Tanggap Bencana ( Destana ) atau hanya 27,78 %

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah mempunyai Indikator Kinerja Utama Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah Dengan target Capaian dari tahun ke tahun sebagai berikut:

- a. Tahun 2021 Target Kinerja 70 Realisasi Kinerja 37,75 Capaian Kinerja 53,93%, Sumber data berasal Penilaian LKE oleh Inspektorat untuk Kecamatan pada Tahun 2021.
- b. Tahun 2022 Target Kinerja 70 Realisasi Kinerja 54,20 Capaian Kinerja 77,42%, Sumber data berasal Penilaian LKE oleh Inspektorat untuk Kecamatan pada Tahun 2022.
- c. Tahun 2023 Target Kinerja 70. Realisasi Kinerja 53,45 Capaian Kinerja 76,35% Sumber data berasal Penilaian LKE oleh Inspektorat untuk Kecamatan Dawe Pada Tahun 2023.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Indeks pemerintahan Kecamatan	56,44%	100%	56,44%	Belum tercapai
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	53,45	70	76,35%	Belum tercapai

Tingkat capaian kinerja untuk tahun 2023 dibandingkan capaian kinerja akhir masa RPJMD dapat kita lihat seperti berikut :

- a. Sasaran Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif Capaian Tahun 2023 sebesar 56,44% untuk Target Akhir Tahun 2023 sebesar 100%, untuk capaian Target akhir masa RPJMD adalah 100%.
  - b. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah Capaian Tahun 2023 sebesar 70 untuk. Target Akhir Tahun 2023 sebesar 70 untuk capaian Target akhirMasa RPJMD adalah 70.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Indeks Pemerintahan Kecamatan	100%	56,44%	56,44%	Kurang optimalnya fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	70	53,45	76,35%	Belum optimalnya Koordinasi dengan Seksi.	Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP

	Perangkat Daerah						kepada semua ASN.  Melakukan evaluasi berkala tentang pelaksanaan SAKIP.
--	------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------

Dalam pencapaian Kinerja Kecamatan Dawe tahun 2023 bisa digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif Target Kinerja Tahun 2023 sebesar 100% untuk realisasi kinerja sebesar 56,44% sehingga capaian adalah Kurang. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah Target Kinerja Tahun 2023 sebesar 70 untuk realisasi kinerja sebesar 53,45 sehingga capaian adalah 76,35%,. Belum tercapainya target disebabkan karena belum optimalnya koordinasi dengan Seksi terkait evaluasi kinerja dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Adapun untuk mengukur tingkat Efisiensi terhadap penggunaan sumberdaya yang ada dapat kita lihat pada tabel realisasi indikator dan anggaran program sebagaimana tersebut dibawah ini.

**REALISASI INDIKATOR DAN ANGGARAN PROGRAM  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No. Rek	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja				Penanggung Jawab	% capaian	Efisiensi
			4	5		TRW.1	TRW2	TRW.3	TRW.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
xxx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.479.993.817	876.139	902.504	1.196.905	1.118.733	Sekcam	93,94	
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	86	Indeks		85,68	85	83,16	91,89	Sekcam	106,84%	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	9.900	1.670	1.368	2.820	3.942	Kasi Yanum	98,99	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	%	519.231.583	15.682	59.945	134.321	285.532	Kasi Ekbang	96,99	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	cakupan kegiatan koordinasi trantib umum	100	%	11.075	4.228	1.320	840	4.615	Kasi Trantib	99,35	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	%	64.533.501	7.728	16.844	11.530	27.221	Kasi Tapem	98,13	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	%	605.139	11.573	57.062	156.323	358.534	Kasi Tapem	96,42	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan		100	%	5.799.940	657	250	4.890	0	Kasi Kesra	99,95	

4.01.02	<b>Program Pemerintahan dan Kesra</b>	cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (kecamatan Dawe)	100	%	<b>17.695.800</b>	<b>840</b>	<b>8.995</b>	<b>1.125</b>	<b>6.485</b>	<b>Kasi Kesra</b>	<b>98,58</b>
---------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----	---	-------------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	--------------

#### Keterangan Warna

Warna	Prosentase				Keterangan
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
	0 s/d 13	0 s/d 26	0 s/d 39	0 s/d 50	Sangat Rendah
	13.1 s/d 17	26.1 s/d 33	38.1 s/d 49	50.1 s/d 65	Rendah
	17.1 s/d 19	33.1 s/d 38	49.1 s/d	65.1 s/d 75	Sedang
	19.1 s/d 23	38.1 s/d 46	56.1 s/d 68	75.1 s/d 90	Tinggi
	23.1 lebih	46.1 lebih	68.1 lebih	90.1 lebih	Sangat Tinggi

Realisasi penggunaan anggaran tahun 2023 yang digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja pada Kecamatan Dawe sebesar 5.280.621.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.713.368.000,- atau sebesar 92,43 %.

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu dari pagu sebesar Rp.58.520.000,- terrealisasi Rp. 48.559.000,- efisiensi Rp. 9.961.000,- atau 20,5%. Hal ini disebabkan karena penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disesuaikan dengan kebutuhan.



6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang ada maka dilakukan pengukuran atas indikator kinerja sehingga dengan demikian akan dapat diketahui tingkat keberhasilan/kegagalan dari suatu program/kegiatan tersebut serta dapat pula diketahui apakah program/kegiatan tersebut menunjang/tidak menunjang dari indikator kinerja tersebut, adapun untuk lebih detailnya dapat diketahui dalam bentuk tabel tersebut dibawah ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	76,35%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks kepuasan masy. atas kinerja perangkat daerah (Kec Dawe)	91,89%	Menunjang
2.	Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Indeks Pemerintahan Kecamatan	56,44%	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (kec. n Dawe)	100%	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik (Kec Dawe)	100%	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Dawe)	100%	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban umum	cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (Dawe)	100%	Menunjang

				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dawe)	100%	Menunjang
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Dawe)	100%	Menunjang

## 6. REALISASI ANGGARAN

Realisasi penggunaan anggaran tahun 2023 yang digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja pada Kecamatan Dawe dapat dijelaskan sebagai berikut untuk pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp.5.713.368.353,-, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 5.280.621.000,- atau sebesar 92,43 % adapun untuk rincian sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.479.994.000</b>	<b>4.094.282.000</b>	<b>91,39</b>
<b><i>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	<i>14.970.000</i>	<i>14.861.000</i>	<i>99,27</i>
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	11.050.000	10.941.000	99,01
Evaluasi kinerja perangkat daerah	3.920.000	3.920.000	100
<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	<i>3.337.807.000</i>	<i>2.979.743.000</i>	<i>89,27</i>
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>3.335.681.000</i>	<i>2.977.744.000</i>	<i>89,27</i>
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keu SKPD	2.126.000	1.999.000	94,03
<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	<i>136.291.000</i>	<i>132.260.000</i>	<i>97,04</i>
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunkantor	5.333.000	5.333.000	100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14.767.000	14.742.000	99,83
Penyediaan peralatan rumah tangga	14.773.000	14.579.000	98,69
Penyediaan bahan logistik kantor	11.151.000	10.912.000	97,86
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.592.000	2.450.000	94,52
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.200.000	3.900.000	92,86
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.475.000	80.343.000	96,25

<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b>85.100.000</b>	<b>84.800.000</b>	<b>99,65</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	85.100.000	84.800.000	99,65
<b><i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i></b>	<b>217.042.000</b>	<b>205.456.000</b>	<b>94,66</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000	2.500.000	100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	58.520.000	48.559.000	82,98
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	156.022.000	154.397.000	98,96
<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i></b>	<b>688.784.000</b>	<b>677.163.000</b>	<b>98,31</b>
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	109.987.000	106.484.000	96,82
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	566.426.000	560.384.000	98,93
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor, bangunan lainnya	12.371.000	10.295.000	83,22
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>9.900.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>98,99</b>
<i>Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</i>	9.900.000	9.800.000	98,99
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di wilayah kecamatan	9.900.000	9.800.000	98,99
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>519.232.000</b>	<b>495.480.000</b>	<b>95,43</b>
<i>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	<i>519.232.000</i>	<i>495.480.000</i>	<i>95,43</i>
Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	17.668.000	13.959.000	79,01
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	501.563.000	481.521.000	96
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>11.075.000</b>	<b>11.003.000</b>	<b>99,35</b>
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</i>	<i>11.075.000</i>	<i>11.003.000</i>	<i>99,35</i>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	11.075.000	11.003.000	99,35
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>64.534.000</b>	<b>63.323.000</b>	<b>98,12</b>
<b><i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i></b>	<b>64.534.000</b>	<b>63.323.000</b>	<b>98,12</b>
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan	64.534.000	63.323.000	98,12
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>605.139.000</b>	<b>583.491.000</b>	<b>96,42</b>
<i>Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan pengawasan pemdes</i>	<i>605.139.000</i>	<i>583.491.000</i>	<i>96,42</i>
Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	10.300.000	9.771.000	94,87
<i>Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</i>	<i>586.659.000</i>	<i>566.916.000</i>	<i>96,63</i>
Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa	8.180.000	6.804.000	83,18

<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.797.000</b>	<b>99,95</b>
<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>5.800.000</i>	<i>5.797.000</i>	<i>99,95</i>
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	<i>5.800.000</i>	<i>5.797.000</i>	<i>99,95</i>
<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>17.696.000</b>	<b>17.455.000</b>	<b>98,58</b>
<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>17.696.000</i>	<i>17.455.000</i>	<i>98,58</i>
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	<i>17.696.000</i>	<i>17.455.000</i>	<i>98,58</i>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kecamatan Dawe dalam pelaksanaan tugasnya mengampu 2 sasaran kegiatan yaitu:

1. Sasaran Terwujudnya Fasilitasi Pelayanan Publik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif, dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Pemerintahan Kecamatan. Untuk mencapai indikator ini, didukung dengan Anggaran sebesar 1.233.376.000,- realisasi Anggaran Rp. 1.186.349.000,- atau sebesar 96,18% dengan capaian kinerja 56,44%.
2. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi Sakip perangkat Daerah. Untuk mencapai indikator ini, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 4.479.994.000 realisasi Anggaran Rp. 4.094.282.000 atau sebesar 91,39 % dengan Capaian Kinerja 76,35%.
3. Secara keseluruhan capaian kinerja dari 2 indikator tersebut adalah 66,40% % dengan kategori Cukup.

#### **B. REKOMENDASI**

1. Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja, perlu adanya perubahan budaya kerja yaitu berkinerja dengan berbasis data.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan Seksi dan Subbag dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

  
CAMAT DAWE  
**FAMNY DWI ARFANA, S.STP**  
Pembina  
NIP. 19870409 200602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**KECAMATAN DAWE**

Jl Kudus - Colo No. 292 A Piji Telp. (0291) 433194 Kode Pos 59353  
Telp 0291433194 Fax -  
email : kecamatandawe122gmail.com Website : dawe.kudus.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAMNY DWI ARFANA, S.STP  
Jabatan : CAMAT DAWE KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si  
Jabatan : Pj. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si

Kudus, 30 Oktober 2023  
Pihak Pertama,  
  
  
FAMNY DWI ARFANA, S.STP  
Pembina  
NSP. 198704092006021001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks Pemerintahan Kecamatan	100,00 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70,00 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.479.993.817	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.799.940	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.695.800	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.900.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	519.231.583	
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.075.000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64.533.501	
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	605.138.712	
<b>TOTAL</b>		<b>5.713.368.353</b>	



Pj. BUPATI KUDUS,

BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si

Kudus, 20 Oktober 2023



GAMST DAWE,  
FAMNY DWI ARFANA, S.STP

Primbina  
NIP. 198704052006021001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**KECAMATAN DAWE**

Jl Kudus - Colo No. 292 A Piji Telp. (0291) 433194 Kode Pos 59353  
Telp 0291433194 Fax -  
email : kecamatandawe122gmail.com Website : dawe.kudus.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAMNY DWI ARFANA, S.STP  
Jabatan : CAMAT DAWE KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH  
Jabatan : BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

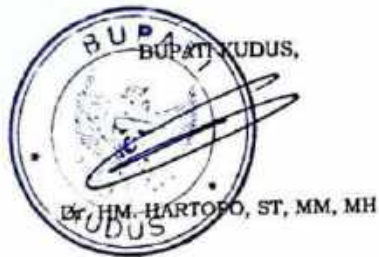




**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks Pemerintahan Kecamatan	100,00 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70,00 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.669.810.067	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.799.940	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.695.800	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.900.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	254.367.398	
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.075.000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64.533.501	
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	405.245.712	
<b>TOTAL</b>		<b>5.438.427.418</b>	





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**KECAMATAN DAWE**

Jl Kudus - Colo No. 292 A Piji Telp. (0291) 433194 Kode Pos 59353  
Telp 0291433194 Fax -  
email : kecamatandawe122gmail.com Website : dawe.kudus.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FARIQ MUSTOFA, SH  
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : FAMNY DWI ARFANA, S.STP  
Jabatan : CAMAT DAWE KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



FAMNY DWI ARFANA, S.STP  
Pembina  
NIP. 19870409 200602 1 001

Kudus, 15 Januari 2023  
Pihak Pertama,

FARIQ MUSTOFA, SH  
PEMBINA  
NIP. 197809281998031003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN DAWÉ  
KABUPATEN KUDUS**

**SEKRETARIS KECAMATAN**

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>86 indeks</b>
	Jumlah Daya / Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan Ketentuan	8 dokumen
	Jumlah Data/ Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan sesuai dengan ketentuan	90 %
	Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	90 %
	Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	90 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.371.397.650</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.970.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.585.756.350	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.373.300	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.298.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.371.397.650</b>	



Kudus, 15 Januari 2023  
SEKRETARIS KECAMATAN KECAMATAN DAWÉ

  
**FARIO MUSTOFA, SH**  
 PEMBINA  
 NIP. 197809281998031003



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**KECAMATAN DAWE**

Jl Kudus - Colo No. 292 A Piji Telp. (0291) 433194 Kode Pos 59353

Telp 0291433194 Fax -

email : kecamatandawe122gmail.com Website : dawe.kudus.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET, S.IP

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : FAMNY DWI ARFANA, S.STP

Jabatan : CAMAT KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kudus, 15 Januari 2023

Pihak Pertama,

SLAMET, S.IP  
Penata TK. I

NIP. 197109111992031007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Posko terpantau dan piket bencana alam	1 posko
2	Honorarium Linmas	12 bulan
3	Honorarium piket kantor	12 bulan
4	Honor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	12 bulan
5	Jumlah kasus Konflik Sosial yang tertangani	12 kasus
6	Rakor Linmas	12 kali
7	Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	12 kali

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.075.000	
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	64.533.501	
<b>TOTAL</b>		<b>75.608.501</b>	



Kudus, 15 Januari 2023  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
UMUM  
KECAMATAN DAWE

**SLAMET, S.IP**  
Penata TK. I  
NIP. 197109111992031007



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**KECAMATAN DAWÉ**

Jl Kudus - Colo No. 292 A Piji Telp. (0291) 433194 Kode Pos 59353  
Telp 0291433194 Fax -  
email : kecamatandawe122gmail.com Website : dawe.kudus.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULIYATI, SE

Jabatan

: KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DAWÉ KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama

: FAMNY DWI ARFANA, S.STP

Jabatan

: CAMAT KECAMATAN DAWÉ KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

**FAMNY DWI ARFANA, S.STP**  
Pembina  
NIP. 198704092006021001

Kudus, 15 Januari 2023  
Pihak Pertama,

**ZULIYATI, SE**  
Penata TK. I  
NIP. 197107261996032003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Pameran Pembangunan yang dilaksanakan	1 kali
2	JUmlah Desa ang mengikuti lomba	1 desa
3	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang melaksanakan pembinaan	1 organisasi
4	Jumlah Organisasi perempuan ang melaksanakan pembinaan	1 organisasi
5	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial	1 kali
6	JUmlah pelaksanaan money dan pelaporan dana desa	18 desa

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan olch Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17.714.890	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	236.652.508	
<b>TOTAL</b>		<b>254.367.398</b>	



Kudus, 15 Januari 2023  
KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
KECAMATAN DAWE

*Zuliyati*

**ZULIYATI, SE**  
Penata TK. I  
NIP. 197107261996032003



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**KECAMATAN DAWE**

Jl Kudus - Colo No. 292 A Pjll Telp. (0291) 433194 Kode Pos 59353

Telp 0291433194 Fax -

email : kecamatandawe122gmail.com Website : dawe.kudus.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET KASMUDI, S.IP

Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : FAMNY DWI ARFANA, S.STP

Jabatan : CAMAT KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 15 Januari 2023

Pihak Pertama,



  
SLAMET KASMUDI, S.IP  
Pembina TK. I  
NIP. 196909011992031005



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah festival seni dan budaya yang dilaksanakan	1 kali

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	5.799.940	
<b>TOTAL</b>		<b>5.799.940</b>	

Kudus, 15 Januari 2023  
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KECAMATAN DAWE

CAMAT  
KECAMATAN DAWE



PAMNY DWI ARFANA, S.STP  
Pembina  
NIP. 198704092006021001

SLAMET KEMUDI, S.IP  
Pembina TK. I  
NIP. 19690901992031005



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**KECAMATAN DAWE**

Jl Kudus - Colo No. 292 A Piji Telp. (0291) 433194 Kode Pos 59353  
Telp 0291433194 Fax -  
email : kecamatandawe122gmail.com Website : dawe.kudus.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRIANA SARI, SE, M.M  
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : FAMNY DWI ARFANA, S.STP  
Jabatan : CAMAT KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,  
FAMNY DWI ARFANA, S.STP  
Pembina  
NIP. 198704092006021001

Kudus, 15 Januari 2023  
Pihak Pertama,

FITRIANA SARI, SE, M.M  
Penata Tk. I  
NIP. 198507092010012028

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah pelaksanaan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan	2 kali

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.900.000	
<b>TOTAL</b>		<b>9.900.000</b>	



Kudus, 15 Januari 2023  
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM  
KECAMATAN DAWE

FITRIANA SARI, SE, M.M  
Penata Tk. I  
NIP. 198507092010012028



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**KECAMATAN DAWE**

Jl Kudus - Colo No. 292 A Piji Telp. (0291) 433194 Kode Pos 59353  
Telp 0291433194 Fax -  
email : kecamatandawe122@gmail.com Website : dawe.kudus.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOCH SOFIAN, S.IP  
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : FAMNY DWI ARFANA, S.STP  
Jabatan : CAMAT KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kudus, 15 Januari 2023

Pihak Pertama,

**MOCH SOFIAN, S.IP**

Penata TK. I

NIP. 197409021996031002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS**


**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Evaluasi penusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes	18 Desa
2	Monev dan pelaporan bidang pemerintah desa	18 desa
3	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	1 kali

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10.299.860	
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	386.766.010	
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.179.842	
<b>TOTAL</b>		<b>405.245.712</b>	



Kudus, 15 Januari 2023  
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN  
KECAMATAN DAWE

  
**MOCH SOFIAN, S.IP**  
Penata TK. I  
NIP. 197409021996031002



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**KECAMATAN DAWE**  
Jl Kudus - Colo No. 292 A Pji Telp. (0291) 433194 Kode Pos 59353  
Telp 0291433194 Fax -  
email : kecamatandawe122@gmail.com Website : dawe.kudus.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KAREL YUDO MENGGOLO  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : FARIQ MUSTOFA, SH  
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
**FARIQ MUSTOFA, SH**  
PEMBINA  
NIP. 197809281998031003

Kudus, 15 Januari 2023  
Pihak Pertama,

  
**KAREL YUDO MENGGOLO**  
PENATA  
NIP. 196509061986071001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN DAWÉ  
KABUPATEN KUDUS

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen
3	Jumlah Orang ang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang
4	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen


No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.050.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.920.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.583.630.350	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.126.000	
<b>TOTAL</b>		<b>3.600.726.350</b>	

SEKRETARIS KECAMATAN  
KECAMATAN DAWÉ



**FARIO MUSTOFA, SH**  
PEMBINA  
NIP. 197809281998031003

Kudus, 15 Januari 2023  
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI,  
PELAPORAN DAN KEUANGAN  
KECAMATAN DAWÉ



**KARLI YUDO MENGGOLO**  
PENATA  
NIP. 196509061986071001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**KECAMATAN DAWE**

Jl Kudus - Colo No. 292 A Pji Telp. (0291) 433194 Kode Pos 59353  
Telp 0291433194 Fax -  
email : kecamatandawe122@gmail.com Website : dawe.kudus.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI ISTIQOMAH, SH  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : FARIQ MUSTOFA, SH  
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

FARIO MUSTOFA, SH  
PEMBINA  
NIP. 197809281998031003

Kudus, 15 Januari 2023

Pihak Pertama,

SITI ISTIQOMAH, SH  
Penata TK. I  
NIP. 196906171992022001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis
2	Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor	32 jenis
3	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6 jenis
4	Belanja Alat Rumah Tangga	22 jenis
5	Belanja Karangan Bunga	1 jenis
6	Belanja Pengisian Tabung Gas	1 jenis
7	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 jenis
8	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis
9	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis
10	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 hari
11	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 jenis
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 jenis
14	Honorarium Non PNS (PHD)	1 orang
15	Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Pelayanan Umum ( Tenaga Kontrak )	7 Orang
16	Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Tenaga Administrasi	2 orang
17	Jumlah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8 orang
18	Jumlah Premi Asuransi yang terbayar	4 dokumen
19	Jumlah BBM dan Olie	6000 liter
20	Jumlah Belanja Suku Cadang	16 unit
21	Jumlah Jasa Operasional Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas	16 unit
22	Jumlah Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas Operasional	16 unit
23	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya dipelihara/ rehabilitasi	1 unit
24	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	4 unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.333.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.806.300	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.773.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.151.000	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.635.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.475.000	
8	Penggadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.099.900	
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.519.517	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.293.000	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.987.000	
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	511.940.000	
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.371.000	
<b>TOTAL</b>		<b>1.069.083.717</b>	

SEKRETARIS KECAMATAN  
KECAMATAN DAWE



**FARIO MUSTOFA, SH**  
PEMBINA  
NIP. 197809281998031003

Kudus, 15 Januari 2023  
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
KECAMATAN DAWE



**SETLISTOCMAH, SH**  
Penata TK. I  
NIP. 196906171992022001

## CAPAIAN IKU KECAMATAN DAWE TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	Penanggung jawab	Penanggung jawab Breakdown Kinerja	Breakdown Kinerja Ke Seksi		Formulasi Perhitungan		Capaian Akhir Tahun (triwulan 4)
-1	-2	-3	-4						
1.Meningkatnya kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	a. Indeks Pemerintahan Kecamatan	§ Formulasi Pengukuran : (10% x Persentase Desa Tanggap Bencana di Kecamatan) + (20% x penurunan gangguan trantibum) + (25% x Desa Tertib Admintrasi) + (10% X Lembaga Kemasyarakatan Beradmitrasi Baik) + (25% x Persentase pelayanan kepada nasyarakat yang sesuai ketentuan) + (10% x persentase sarpras pelayanan umum dalam kondisi baik)  § Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Camat	Kasi Trantib	10% x Persentase Desa Tanggap Bencana di Kecamatan	10	Jumlah Desa tanggap bencana : Jumlah Desa di Kecamatan x 100	27,78	2,78%
				Kasi Trantib	20% x penurunan gangguan trantibum	20	Jumlah gangguan trantibum di kecamatan tahun (n-1) - jumlah gangguan trantibum di kecamatan (n)	21,74	4,35%
				Kasi Tapem	25% x Desa Tertib Admintrasi	25	(Jumlah Desa yang beradministrasi baik : Jumlah desa di kecamatan Dawe X 100) x 25 %	66,67%	16,67%
				Kasi Ekbang	10% X Lembaga Kemasyarakatan Beradmitrasi Baik	10	(Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa (LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan RT RW) beradministrasi baik : Jumlah lembaga kemasyarakatan desa sekecamatan x 100) x 10 %	80,00	8,00%
				Kasi Yanum	25% x Persentase pelayanan kepada masyarakat yang sesuai ketentuan	25	(Jumlah Pelayanan kepada masyarakat yang sesuai SP : Jumlah Pelayanan kepada masyarakat yang ada di kecamatan x 100) * 25 %	100,0	25,00%
				Kasi Kesra	10% x persentase sarpras pelayanan umum dalam kondisi baik	10	(Jumlah Sarpras Pelayanan Umum dalam kondisi baik : Jumlah Sarpras Pelayanan Umum di Kecamatan x 100) x 10%	94,29	9,43%
						JUMLAH	10		
2.Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	b. Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	§ Formulasi Pengukuran : Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah dari Inspektorat § Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Camat	Sekcam	NILAI		<b>63,70%</b>		



No	Anggaran / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output / Kegiatan / Output) dan Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Biaya (2022) (Rp)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya (2022) (Rp)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya (2022) (Rp)		KMK
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	II			
2.000.01.2.06.01	Proyeksi Anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem	Jumlah Administrasi Umum yang diterima	60.50	20.000	60.000	607	7.000	71.800	62,3	71.800	62,3	68.817	100	68.817	100		
2.000.01.2.06.01	Proyeksi Anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem	Jumlah Surat Keputusan, Perintah, dan Instruksi Kepala Kantor yang diterbitkan	5.140	2.000	2.000	607	0	1.393	5,140	1.393	5,140	5,140	100	5,140	100		
2.000.01.2.06.01	Proyeksi Anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem	Jumlah barang tidak jelas yang dipungut secara rutin dari Pemukiman Kantor	14.773	4.840	11.000	2.000	3.000	12.000	14,773	3.000	14,773	14,773	100	14,773	100		
2.000.01.2.06.01	Proyeksi Anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem	Jumlah Asat Ransum Teranga	22 jiwa	5.140	6.000	1.000	1.000	8.000	22,000	8.000	22,000	22,000	100	22,000	100		
2.000.01.2.06.01	Proyeksi Anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem	Jumlah Pagar tembok yang sudah selesai	3.140	2.385	1.300	0	2.045	0	3,140	2.045	3,140	3,140	100	3,140	100		
2.000.01.2.06.01	Proyeksi Anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem	Jumlah Pagar tembok yang sudah selesai	3.140	2.385	1.300	0	2.045	0	3,140	2.045	3,140	3,140	100	3,140	100		
2.000.01.2.06.01	Proyeksi Anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem	Jumlah dokumen bahan-bahan dan peralatan yang digunakan	3.140	0	0	0	0	0	3,140	0	3,140	0	0	0	0		
2.000.01.2.06.01	Proyeksi Anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Super Komando dan Komando SAKO	200 kali	30	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0		
2.000.01.2.07.01	Proyeksi Anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem	Jumlah Unit Pemukiman dan Unit Lainnya yang Dibangun	12 Unit	8	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	0	0	0		





No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Biaya CRP Tahun Berjalan (2022) (Rp)	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya CRP pada Dwiwulan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya CRP pada Triwulan		Nilai		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	19				
701.03.1.01.01	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Raker Perencanaan Adhivisi (Kecamatan)	2.148		1		0,00		0,00		1,00		0,00		1,00		0,00	2		100					
701.03	PROGRAM PERENCANAAN MANUSIA DAN SUMBER DAYA MANUSIA		819.232		100 %		20		20		25		81,78		208.832		403.400	81,78			80,43				
701.03.1.01	Koordinasi Kegiatan Perencanaan Data	Cakupan kegiatan perencanaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	219.232		100 %		20		20		25		81,78		208.832		403.400	81,78			80,43				
701.03.1.01.01	Sistemasi Program Kerja dan Kegiatan Perencanaan Masyarakat yang dilakukan oleh Timoror dan Desa di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah koordinasi kegiatan Perencanaan Desa yang berhasil	17.888		100 %		8		8		8		100		17.888		17.888	100			100				
701.03.1.01.01	Penggiatan Timoror Kegiatan Perencanaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Timoror Perencanaan yang dilaksanakan	501.583		100 %		8.000		8.000		8.000		100		501.583		501.583	100			100				
		Jumlah Desa yang mendapat Timoror	1.000		100 %		1.000		1.000		1.000		100		1.000		1.000	100			100				
		Jumlah Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan (pendirian organisasi)	1		100 %		1.000		1.000		1.000		100		1.000		1.000	100			100				
		Jumlah Kegiatan perencana yang dilaksanakan (pendirian organisasi)	1		100 %		1.000		1.000		1.000		100		1.000		1.000	100			100				
		Jumlah pelaksanaan Timoror dan Perencanaan lainnya	18.000		100 %		18.000		18.000		18.000		100		18.000		18.000	100			100				
701.03	PROGRAM KOORDINASI KETERKAITAN DAN KETERISIAN LAIN-LAIN		11.875		100 %		4.208		4.208		4.208		100		11.875		11.875	100			100				
701.03.1.01	Koordinasi upaya pengembangan komunikasi dan hubungan dengan	Jumlah koordinasi upaya pengembangan komunikasi dan kemitraan lintas yang berhasil	11.875		100 %		4.208		4.208		4.208		100		11.875		11.875	100			100				
701.03.1.01.01	Sinergis dengan kegiatan kegiatan Pokjah, Indonah, Timoror, Kemitraan dan kemitraan lintas di tingkat Kecamatan		11.875		100 %		4.208		4.208		4.208		100		11.875		11.875	100			100				







